HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA: MODEL PEMERINTAHAN DALAM BINGKAI PEMIKIRAN ISLAN

Oleh

Salito¹, Imam Sanusi², Muhammad Amri³, Indo Santalia⁴

^{1,2,3,4} UIN Alauddin Makasar

Email : salito@gmail.com

Article History:

Received: 03-11-2022

Revised: 13-11-2022

Accepted: 23-12-2022

Keywords:

kemampuanberbicara,berma
inperan

Abstract: Agama dan Negara dalam model pemerintahan dalam bingkai pemikiran Islam tidak terlepas pada peran Nabi Muhammad Saw. Sebagai pemimpin, regeslatif, ydikatif pada saat ke Nabian. Dengan adanya Intelektual muslim di dunia pada saat ini, terdapat tiga pandangan tentang hubungan antara ajaran Islam dan masalah kenegaraan. Pertama mereka yang tetatp mempertahankan integrasi antara Islam dan Negara, Kedua, kelompok modernis atau neomodernis,. Ketiga, kelompok sekuler, yakni mereka yang ingin memisahkan antara Islam dan Negara. Hubungan agama dan Negara Islam adalah yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia. Juga Sepanjang sejarah hubungan antara kaum muslim dan non muslim Barat (Kristen Eropa) adalah hubungan yang penuh ketengangan dimulai dengan ekspansi militer politik Islam Klasik Pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam yang melaksanakan kewajibankewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam dan tidak terlepas dari kepemimpinan Rasulullah Saw, sahabat-sahabt Nabi smpai kepada dinasti-dinasti kerajaan Islam masa kejayaan.

PENDAHULUAN

Otoritas yang bersumpah pada Tuhan, agama, dan negara seringkali bertabrakan dalam panggung sejarah yang mana Tuhan punya keadilan yang laus dan tidak bisa di hitung nikmatnya. Masing-masing menawarkan janji keselamatan dan pembebasan yang membuat umat manausia tunduk dan patuh pada Tuhan, namun juga menuntut loyalitas serta pengorbanan. Secara ontologis, agama dan negara adalah derivasi dan akibatdari firman Tuhan yang memberikan pertolongan apada umatnya, karena Tuhan adalah Maha Absolut, sumber dan akhir dari segala wujud yang ada dari ketidak adaan. Namun sekarang hadir bersama dalam kesadaran manusia dan menjelma dalam lembaga yang adakalanya seakan saling memperebutkan hegemoni (Fachruddin Fuad, 2006).

Dalam hal ini sudah tidak adagium bahwa agama merupakan suatu bentuk keyakinan yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi peradaban sebagai anomali peradaban itu sendiri. Implikasinya, agama tidak sekedar masalah yang terkait dengan persoalan metafisis dan supranatural tetapi juga telah memaksa masuk pada wilayah realitas sosial. Keduanya adalah unitas yang tidak terpisahkan.

Sebagai sumber inspirasi sebenarnya nilai agama tidak pernah kering untuk dikuras sesuai dengan konteks yang menyertainya. Artinya tanpa meninggalkan substansi ajaran dan nilai agama sehingga dalam batas-batas tertentu aplikasi ajaran bisa beragam dan dinamis. Dengan kata lain, agama bisa ditransmisikan dalam berbagai dimensi kehidupan. Sehingga agama punya peranan penting dalam kehidupan kita apalagi dikaitkan dengan Negara dan model pemerintahan pada saat ini.

Pemahaman serta sosok agama dan negara senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Muatan dan spirit keberagaman agama apa pun yang lahir belasan abad lalu sudah pasti mengalami perkembangan karena zamannya senantiasa berubah. Misalnya, dahulu ketika wahyu Alquran turun langsung terlibat dialog dengan persoalan politik dan sosial secara langsung dalam kurun waktu 23 tahun. Itu pun dipandu langsung oleh Rasulullah Muhammad yang memperoleh otoritas tunggal dari Tuhan jika muncul perselisihan.

Dikursus yang kursorial dalam hal ini memungkinkan agama yang diturunkan oleh Tuhan yang diyakini yang maha kasih. Sementara disisi lain, ditubuh internal agama sendiri semakin gencar proses kritisasi terhadap peran agama. Hampir semua agama diperuntukkan doktrin yang nyaris tidak terantahkan bahwa agama diperuntukkan bagi pembentukan spritualitas¹.

Hubungan antara agama dan Negara tidak akan luput dari pergejolan pemikiran politik, karena agama sebagai indikator yang sensitive dan dijadikan isu yang meluas dalam hal ini pemikiran Islam harus bisa memberikan jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar warga masyarakat atau dasar sikap saling hormat, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tegang rasa saling pengertian yang besar.

METODE PENELITIAN

Kajian ini termasuk studi pustaka (*library research*)², maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan telaah atas sejumlah literatur yang terkait dengan topik bahasan terutama yang memuat tentang Hubungan Antara Agama Dan Negara: Model Pemerintahan Dalam Bingkai Pemikiran Islam. Tentu saja menggunakan buku-buku yang berkenaan dengan pemikiran antara Negara dan agama sehingga menjadikan konsep pemikiran Islam. Penelitian ini juga bersifat "diskriptif analitis".³ yaitu metode yang dipergunakan untuk meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang tertuang dalam media cetak, baik yang berbentuk naskah primer adalah buku-buku yang terkait pemikiran Islam maupun naskah sekunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya⁴.

¹Hariansyah. Psikologi Agama Benevolent Chemistry Untuk Menginspirasi Sikap Beragama. Pontianak: STAIN Pontianak Press. 2008. Hal: 4

²Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pengantar Praktek (Jakarta: Bineka Cipta, 1992), h. 10.

³Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja, Rosdakarya, 1995), h. 3; Kuntjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 31.

⁴ 4Jujun S. Suriasumantri, Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: mencari Paradigma

Dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal, koran, dan sebagainya.

Penelitian ini sepenuhnya bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*). Data yang dihimpun melalui riset kepustakaan yang terdiri dari data sumber (primer) berupa buku-buku yang berkenaan dengan model pemikiran Islam dan data pelengkap (skunder) untuk menginterpretasi data sumber berupa majalah, koran yang berkenaan dengan judul yang akan di bahas. dengan cara: a. Kutipan langsung; yaitu mengutip langsung dari sumbernya tanpa perubahan sedikitpun. b. Kutipan tidak langsung; yaitu kutipan yang dirangkum dalam bentuk ikhtisar dari konsep aslinya, atau berupa saduran, namun tidak mengurangi makna atau tujuannya.

Analisis Data. Untuk penelitian ini, pengolahan data sepenuhnya bersifat “kualitatif”, karena data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan teknik “induktif”, deduktif” dan komparatif”. a. Induktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang bersifat khusus kepada pengertian dan kesimpulan yang bersifat umum, b. Deduktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang sifatnya umum untuk memperoleh pengertian dan kesimpulan yang bersifat khusus dari data tersebut. c. Komparatif; yaitu membandingkan antara satu data dengan data lainnya untuk memperoleh satu pengertian atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberagaman sering dijadikan terjemahan dari kata *religiositas*. Religiositas berasal dari kata *religious* yang merupakan kata sifat dari kata benda *religio*. Sulit melacak makna *religio*. Orang sering menghubungkan dengan kata kerja *re-eligere* yang berarti mengikat kembali atau *relegen* yang berarti terus-menerus berpaling kepada sesuatu. *Religio* kemudian diterjemahkan dengan agama dan kepercayaan. Agama berasal dari kata senkerta. Satu pendapat mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dia kata *a*=tidak dan *gam*=pergi, jadi tidak pergi, tetap di tempat, diwarisin terus termurun. Beragama adalah kecenderungan yang tidak dapat dielakkan manusia. Sekalipun nalar mengalami keterbatasan dalam memahami doktrin-doktrin agama, tetapi manusia “dipaksa” oleh nalarnya untuk mengakui agama⁵.

Tidak terhitung banyaknya sarjana mengabdikan hidupnya pada tafsiran, analisis, dan penjelasan teks-teks keagamaan. Dogma-dogma agama melampaui akal manusia terbatas. Mansel menyebutkan manusia hanya bisa percaya atau tidak karena akal Manusia tidak mampu mengukuhkan atau menyangkal rumus-rumus agama.⁶ Gelombang dinamika gagasan baru muncul pada masa aksial (*azial age*) yang terjadi 500SM samapi 600 M. yaitu secara era renaisans agama yang menyatakan bahwa di samping dunia kita yang terkungkung kodrat manusia, hukum-hukum fisika dan ketidakadilan terdapat suatu dunia nun jauh di sana yang jauh lebih baik daripada yang erbaik di dunia.

Kebersamaan,” dalam Dede Ridwan, ed. Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antara Disiplin Ilmu, (Bandung: Nuansa, 2001), h. 68-69

⁵Ridwa Lubis. Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. 2017 hal. 1

⁶ Lihat Donald B. Calne dalam Ridwa Lubis. Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. 2017 hal. 2

Menurut Weber, dalam kehidupan keagamaan ditemukan tiga pemilahan sebagai berikut. Pertama, semua masyarakat pada setiap tingkatan perkembangan manapun selalu memiliki bukan hanya elemen-elemen budaya sekuler atau alamiah, tetapi juga adikodrati. Selanjutnya semua komponen adikodrati memiliki elemen magis dan regius meski proporsi dan realisasinya berbeda-beda. Kedua semua komponen adikodrati memiliki peran yang bisa mendukung system magi dan system agama meski sekali lagi dengan berbagai permrdaan kombinasi komponen didalamnya. Ketiga, pada tataran normative, system magi dan system agama memiliki sanksi adikodrati yang mewujudkan dalam system tabu atau etika agama⁷. Hal inilah yang menjadi dasar pengalaman orang-orang dalam dunia tasawuf.

Di kalangan ulama dan intelektual muslim di dunia pada saat ini, terdapat tiga pandangan tentang hubungan antara ajaran Islam dan masalah kenegaraan. *Pertama* mereka yang tetap mempertahankan integrasi antara Islam dan Negara, karena menurut mereka, Islam telah lengkap mengatur system kemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari 1) konservatif, yakni mereka yang tetap mempertahankan tradisi praktik dan pemikiran politik Islam Klasik/pertengahan, seperti syid Ridho dan 2) fundamentalis atau islamis, yakni mereka yang ingin melakukan reformasi system sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak system yang dibuat manusia, seperti Sayyid Quthb, Abula'la Maududi, dan Hasan Turabi. *Kedua*, kelompok modernis atau neomodernis, yakni berpendapat bahwa Islam mengataur masalah keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja, adapun secara teknis umat Islam bisa melakukan ijtihad, termasuk mengadopsi system lain, termasuk system Barat yang sudah menunjukkan kemaslahatannya. Diantara tokoh kelompok ini, yaitu Muhammad Abdu, Husein Haikal, dan Muhammad Hasad. *Ketiga*, kelompok sekuler, yakni mereka yang ingin memisahkan antara Islam dan Negara, karena menurut kelompok ini, Islam, seperti agama-agama lainnya, tidak mengatur masalah keduniaan, sabagai mana praktik kenegaraan yang terdapat di Barat, diantara tokoh aliran ini, Ali Abd.al-Arziq dan Thaha Husen⁸

Salah satu hal yang mengenai Islam yang tidak mungkin diingkari ialah pertumbuhan dan perkembangan agama itu bersama dengan kebutuhan dan perkembangan system politik yang diilhaminya. Sejak Rasulullah saw. Melakukan hijrah dari Mekka ke Yastrib yang kemudian diubah namanya menjadi Madina hingga saat sekarang ini wujud sekurang-kurangnya kerajaan Saudi Arabia dan Republik Islam Iran, Islam yang menampilkan dirinya sangat terkait dengan masalah kenegaraan.

Dilihat dari persepektif agama maka agama yang dihadirkan dalam proses perwahyuan melalui utusan Tuhan yang sebut malaikat bertujuan untuk memperkuat kembali kontrak yang dilakukan manusia dengan Tuhan ketika masih berada di alam azali. Dalam kaian itulah, beragama bukan sesuatu hal yang asing, tetapi merupakan hal yang melekat dalam diri manusia. Sebaliknya, manusia yang mencoba untuk menolak mengakui Tuhan dengan segala aturannya adalah sikap yang bertentangan dengan posisi transenden yang dimiliki manusia. Dampaknya, manusia tersebut akan meliputi oleh kegelisahan batin karena menolak kebenaran adanya realitas kebenaran fakta-fakta kehidupan yang selalu

⁷Max Weber dalam Ridwa Lubis. Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. 2017 hal. 5

⁸Masykuri Abdillah, Islam dan Demkrasai Respon Intelektual Muslim Terhadap Demokrasi 1966-1993. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015:53

menjurus kepada pengakuan adanya Tuhan. Akibatnya, tentu akan terjadi konflik batin dari manusia. Apabila ia tidak menemukan jalan konversi, yaitu berpindah keyakinan untuk mengatasi kecemasan tersebut maka ia akan tetap berada dalam keresahan batin yang tidak ada taranya.

Pesersepsi tentang agama mengalami perubahan seiring dengan jadinya perkembangan masyarakat. Adanya perkembangan itu membawa pengaruh kepada perubahan sifat agama. Pertama, tahapan primitif, yaitu kehidupan beragama diwarnai dengan kepercayaan pada berbagai mitos serta keberadaan makhluk spiritual. Kedua, Agama agama akan ditandai dengan munculnya kepercayaan kepada dewa, padre, ibadat, kurban yang sering kali di jumpai konsep tentang kerajaan Tuhan sebagai penggambaran kemaha kuasa Tuhan. Ketiga agama historis, yaitu lahirnya agama agama besar di dunia intinya adalah penolakan terhadap dunia sekuler dan pebetapan suatu dunia eksistensi yang lahin yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan. Keempat agama modern pada awalnya yaitu agama yang beriringan dengan munculnya reformasi dikalangan penganut Kristen. Kelima agama modern yang dikonsepsikan dengan bentuk kehidupan beragama yang konsep dan ritual agama telah digantikan etika humanistic dan berbagai hal sekuler. Islam hadir pada agama historis yang memperkenalkan ajaran baru bagaimanapun seharusnya manusia bersikap terhadap realitas adanya potensi kebebasan berkehendak serta adanya potensi kemampuan untuk mewujudkan kehendak itu. Demikian Islam sebagai agama modern lain yang menyeimbangkan antara rasionalitas dan keimanan sebagai dua hal yang saling memperkuat.

Agama dan Negara mempunyai konsep tersendiri dalam kepalaksananya tidak terlepas dari kepemimpinan Negara yang mana dua sisi yang tidak bisa dihilangkan, namun akan hadir politik dalam kekuasaan sehingga Negara akan rapuh ketika politiknya tidak mengimbangi dengan agama yang baik, sehingga akan haus kekuasaan dan Negara akan hancur dengan sendirinya, seperti pada kejayaan Islam saat kehalifan dari muawiyah sampai usmani.

Model Pemerintahan Dalam Bingkai Pemikiran Islan

Sesungguhnya secara umum, keterkaitan antara agama dan Negara, dimasa lalu dan pada zaman sekarang, bukan hal yang baru, apalgi hanya khas Islam. Pembicaraan hubungan antara agama dan Negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. Ini disebabkan.

1. Hubungan agama dan Negara Islam adalah yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia.
2. Sepanjang sejarah hubungan antara kaum muslim dan non muslim Barat (Kristen Eropa) adalah hubungan yang penuh ketegangan dimulai dengan ekspansi militer politik Islam Klasik yang sebagian besar kerugian Kristen (hamper semua timur tengah adalah dahulunya kawasan Kristen malah pusatnya) dengan kulminasinya berupa pembebasan konstantinopel (ibu kota Eropa dan Dunia Kristen saat itu), kemudian perang salib yang kalah menang silih berganti namun kemudian di menangkan oleh Islam, lalu berkembang dalam tatanan dunia yang dikusai oleh Barat imperialis-kolonialis dengan Dunia Islam sebagai yang paling dirugikan. Disebabkan oleh hubungan antara Dunia Islam dan Barat yang traumatic tersebut, lebih-lebih lagi karena dalam fasenya yang terakhir Dunia Islam

dalam posisi “kalah” maka pembicaraan tentang Islam berkenaan dengan pandangan tentang Negara berlangsung dalam kepahitan menghadapi Barat sebagai “musuh”⁹

Retorika “Negara Islam” dalam siding-sidang konstituantepun harus dilihat dari sudut pandang seperti itu, meskipun kejadiannya tetap disesalkan. Tentu saja ada pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok Islam yang benar-benar menginginkan “Negara Islam” tetapi kita juga tetap kita juga dapat berbicara dengan nada serupah tentang kelompok fundamentalis¹⁰

Dalam pemerintahan agama menjadi sangat penting. Karena dengan agama yang baik maka pemerintahannya juga baik, dalam hal ini perlu adanya para cendekiwan muslim yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan ilmu agama yang sempurna sehingga pemerintah agama menjadi lebih baik, dalam hal ini pemikiran Islam juga akan ikut andil dalam pemerintahan antara agama dan Negara.

Ukuran yang bisa dipakai untuk menyebut sebuah pemerintahan atau Negara, atau Negara Islam adalah apakah dia menjalankan syariat Islam atau tidak dalam system kekuasaannya. Sayangnya. Banyak yang mempersepsi hal yang ini dianggap sempit, memang selama ini di yang menjadi perdebatan adalah penerapan syariat Islam, baik ditingkat internasional, nasional, ataupun local, peraturan hukum menjadi legalitasnya¹¹.

Seringkali tidak akan menjadi masalah bentuk Negara, apakah sudah mewakili penerapan syariat Islam atau belum, lantas masyarakat apakah sudah menetapkan hukum-hukum itu dalam kesehariannya. Asalkan sudah mencantumkan “syariat Islam” dalam hukum positif, maka sudah bisa disebut sebagai Negara Islam ini menjadi pandangan yang terlalu formalistic dan berbaya.

Dengan munculnya pemikiran Islam tentang Negara Islam maka menjadi salah satu tolak ukur, maka perlu adanya pemimpin yang ideal dalam Islam yang memiliki kekuasaan terbesar dan berakhlak mulia seperti Rasulullah SAW. tetapi jika keduanya tidak bisa muncul bersamaan yang dipilih bukan lah kekuasaan politik melainkan budaya keilmuan dan akhlak yang mulia yang menyebar secara halus dalam kehidupan umat pada saat ini. Kejujuran dalam perilaku, kedisiplinan dan kerja keras dalam bekerja, sopan santu dalam bergaul, semangat maju pantang mundur dalam riset sains dan teknologi, kesetaraan bersama dalam perekonomian menjadi kekuatan Islam yang menerobos dalam kehidupan masyarakat.

Pemilik jalur kekuasaan politik tampak dibarengi dengan akhlak yang mulia hanya akan menimbulkan bencana bagi siapa saja. Dia tidak akan membela umatnya. Apalagi membela kepentingan agamanya, yang di belaka kekuasaannya adalah sekedar kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya. Tak perlu lagi apakah orang lain itu saudara dalam agama atau bukan, semuanya disikatnya ketika menghalagi ambisinya dalam berkuasa.

Ajaran agama menekankan kepada dua kebenaran yaitu kebenaran etika (athical prophecy) yang lebih menekankan bahwa satu kenaran di ukur menurut ukuran logika dan kebenaran agama (exemplary prophecy) yang diukur dari ketinggian dari ajaran agama.

Sistem Pemerintahan dalam Islam

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah

⁹ Nurholish Madjid. Islam Universal. Bandung; Pustaka Pelajar. 2007:203

¹⁰ Dian Rakyat. Islam Doktrin Peradaban. Jakarta; Pramadina

¹¹ Agus Mustofa. Perlukah Negara Islam. Surabaya; Padma Press. tt hal 47

yang beragama Islam yang melaksanakan kewajibankewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.¹²

Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing-umat sehingga system pemerintahan yang ada memberi andil yang kuat dalam system pemerintah.

Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki), imamah, monarki dan demokrasi. Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.¹³

Berdasarkan ijma' sahabat, wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasulullah wafat, mereka bersepakat untuk mendirikan kekhalifahan bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Usman, dan Ali, sesudah masing-masing dari ketiganya wafat. Para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban mendirikan kekhalifahan, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah, tetap mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan. Oleh karena itu, kekhalifahan (khilafah) adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama.

Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut khilafah (kekhalifahan). Orang yang menjalankan tugas itu disebut khalifah. Tentang penamaan khalifah Allah masih sering muncul pertentangan. Sebagian orang membolehkannya, berdasarkan kekhalifahan universal yang diperuntukkan seluruh anak Adam, yang dikandung dalam firman Allah: "Sesungguhnya Dia menciptakan mereka sebagai khalifah-khalifah". Jumhur ulama melarang memberi nama demikian, karena menurut mereka ayat tersebut tidak bermaksud begitu. Lagi pula, Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil dengan nama tersebut. "Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulullah".¹⁴

Dalam hubungannya dengan sub judul ini, maka pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintahan dalam perspektif Islam yang tentunya pembahasan dengan menengok

¹²Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003, hlm. 39

¹³Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasaht Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 204-205

¹⁴Ibid., hlm. 206

pemerintahan di masa Nabi Muhammad Saw (negara Madinah). Sehubungan dengan itu, menurut Mohammed S. Elwa bahwa siapa saja terlibat dalam sebuah riset tentang prinsip-prinsip sistem politik Islam dan sejarahnya, maka harus menerima kenyataan bahwa Rasulullah Saw adalah yang pertama kali membentuk pemerintahan Islam, sesudah hijrah dari Mekkah ke Madinah.¹⁵

Menurut Hasan al-Banna, Islam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa Imam (pemimpin). Jadi orang yang menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, maka ia mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Islam.¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa masa kenabian adalah masa yang pertama dari sejarah Islam, dan semenjak Rasulullah memulai dakwahnya sampai beliau wafat yang dinamakan masa itu dengan masa kenabian atau masa wahyu, mengingat ciri-ciri yang membedakannya dari masa-masa yang lain, adalah masa yang ideal, yang di masa itulah puncak berwujudnya keagungan Islam. Masa kenabian itu, terbagi kepada dua periode yang dipisahkan oleh hijrah. Dalam pada itu tidak ada di antara kedua fase itu perbedaan yang tegas bahkan periode yang pertama, adalah sebagai perintis jalan bagi yang kedua. Di dalam periode yang pertama, timbullah benih masyarakat Islam dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.¹⁷

Dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena jamaah Islamiyah pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua-dua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, adalah masa pembentukan dasar dan membangun. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya. Karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi tafkir nazhary, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam aliran. Walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak

¹⁵Mohammed S. Elwa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983, hlm. 19

¹⁶Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna*, alih bahasa, Su'adi Sa'ad, "Konsep Pembaruan Masyarakat Islam", Jakarta: Media Da'wah, 1986, hlm. 374-375.

¹⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 3.

mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar, Di kota itu, "mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.¹⁸

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugastugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.¹⁹

Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai katib (sekretaris), sebagai 'amil (pengelola zakat) dan sebagai qadhi (hakim). Untuk pemerintahan di daerah, Nabi mengangkat seorang wali, seorang qadhi dan seorang 'amil untuk setiap daerah atau propinsi. Pada masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari sejumlah propinsi, yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Mekkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang qadhi diberi beberapa kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali. Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua orang qadhi yang diangkat Nabi, yang bertugas di dua propinsi berbeda. Nabi juga selalu menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah bila beliau bertugas keluar, memimpin pasukan misalnya. Demikian pula kedudukan beliau sebagai panglima perang, beliau sering wakikan kepada para sahabat. Seperti dalam perang Muktah (8 H), beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya. Beliau juga berpesan: Kalau Ziad gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawaha memegang pimpinan.²⁰

Adapun pranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan, adalah usaha Nabi Muhammad SAW mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini beliau mengelola zakat, infaq dan sadaqah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah yaitu harta rampasan perang dan jizyah (pajak) yang berasal dari warga negara non-muslim. Jizyah oleh kalangan juris muslim disebut juga "pajak perlindungan" (*protection tax*).

Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan

¹⁸Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 88-90.

¹⁹J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 97

²⁰Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, Terj. Ali Audah, cet, ke-29, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003, hlm. 399-440.

beliau sebagai hakam untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya, dan sekali beliau wakilkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakilkan kepada sahabat, dan penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum. Dari sebagian contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati.²⁴ Dalam konteks itu beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai bentuk dan corak Negara Madinah tersebut di zaman Rasulullah. Ali Abd al-Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai pemerintahan dan tidak pula membentuk kerajaan. Sebab beliau hanya seorang Rasul sebagaimana Rasul-Rasul lain, dan bukan sebagai seorang raja atau pembentuk negara. Pembentukan pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepada beliau. Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan pemerintahan, namun bentuk pemerintahannya sangat sederhana, dan kekuasaannya bersifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat. Karena sebagai Rasul beliau harus mempunyai kekuasaan yang lebih luas dari kekuasaan seorang raja terhadap rakyatnya. Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan seorang Rasul yang membawa ajaran baru, dan bukan kepemimpinan seorang raja, dan kekuasaannya hanyalah kekuasaan seorang Rasul, bukan kekuasaan seorang raja.²¹

Berbeda dari pendapat ini, Khuda Baks, penulis dari Gerakan Aligarh India, menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga membentuk suatu pemerintahan yang bercorak teokratis. yang puncaknya berdiri seorang wakil Tuhan di muka bumi. Pada umumnya, para ahli berpendapat, masyarakat yang dibentuk oleh Nabi di Madinah itu adalah negara, dan beliau sebagai kepala negaranya. Watt, seorang orientalis, menyatakan masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejawantahan dari persekutuan suku-suku bangsa Arab. Instansi persekutuan itu adalah rakyat Madinah dan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Sebab beliau disamping seorang Rasul juga adalah Kepala Negara. Hitti juga berpendapat, terbentuknya masyarakat

keagamaan di Madinah yang bukan berdasarkan ikatan darah membawa kepada terbentuknya Negara Madinah. Di atas puncak negara ini berdiri Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan di muka bumi. Beliau disamping tugas kerasulannya juga memiliki kekuasaan dunia seperti kepala negara biasa. Dari Madinah teokrasi Islam tersebar ke seluruh Arabia dan kemudian meliputi sebagian terbesar dari Asia Barat sampai Afrika Utara. Dalam Negara Madinah itu memang ada dua kedaulatan, yaitu kedaulatan Syariat Islam sebagai undang-undang negara itu, dan kedaulatan umat. Syariat Islam

²¹ Karen Armstrong, Muhammad Biografi Sang Nabi, Terj. Joko Sudaryanto, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004, hlm. 250-28

sebagai undang-undang di satu segi ia membatasi kekuasaan umat untuk membuat undang-undang mengenai hukum sesuatu bila penjelasan hukumnya sudah jelas dalam nash syariat. Tapi di segi lain ia memberi hak kebebasan kepada umat untuk menetapkan hukum suatu hal yang belum jelas hukumnya, memerintahkan kepada umat agar memusyawarahkan setiap urusan mereka, yaitu urusan yang belum jelas hukumnya dalam nash syariat. Ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu aktivitasnya yang menonjol di bidang pranata sosial politik dalam memimpin negara Madinah. Jadi negara Madinah itu adalah negara yang berdasarkan Syariat Islam, tapi ia memberi hak bermusyawarah dan berijtihad kepada umat. Dengan demikian corak Negara Madinah adalah negara berasaskan syariat Islam, dan bersifat demokratis.²²

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah ditegaskan bahwa praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun pada prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu dalam memberikan solusi yang kogrit. Abu Bakar menjadi khalifah cukup singkat yaitu 2 tahun (11-13 H), tapi pengangkatannya merupakan awal terbentuknya pemerintahan negara Madinah model Khilafah dalam sejarah Islam.

Pemerintahan model Khilafah ini tampaknya belum berbeda jauh dengan sistem pemerintahan pada masa Nabi. Sepeninggal Abu Bakar, jabatan khalifah diamanatkan kepada 'Umar bin Khaththab yang bergelar Khalifatu-khalifatu Rasulullah. namun Umar sering dipanggil Amir al-Mu'min. Umar tidak diangkat berdasarkan musyawarah, melainkan penunjukan Abu Bakar yang didahului konsultasi dengan sahabat lain. Abu Bakar mengambil inisiatif ini karena khawatir akan terulang peristiwa Bard Saqifah. Oleh karena itu sikap Abu Bakar ini dianggap para Yuris Sunni sebagai ijtihad Abu Bakar pribadi.²³ Di zaman pemerintahan 'Umar terjadi perluasan daerah yang begitu cepat sehingga administrasi pemerintahan mengalami perkembangan. Sistem pembayaran gaji dan pajak mulai diatur dan tertibkan, pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, jawatan kepolisian dibentuk. Salah satu mekanisme pemerintahan yang penting ialah pembentukan Majelis Permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri dari suku Aus dan Kazraj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian 'Umar jauh sebelum lahinya teori "Trias Politica" telah mengatur administrasi pemerintahannya melalui pembagian atau pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif yang ia pimpin, sedangkan yudikatif dilimpahkan kepada hakim dan kekuasaan legislatif ada pada Majelis Permusyawaratan.²⁴

²² J. Suyuthi Pulungan, op.cit., hlm. 100-101.

²³ Sirajuddin, Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 42

²⁴ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 180.

KESIMPULAN

Intelektual muslim di dunia pada saat ini, terdapat tiga pandangan tentang hubungan antara ajaran Islam dan masalah kenegaraan. *Pertama* mereka yang tetap mempertahankan integrasi antara Islam dan Negara, karena Islam telah lengkap mengatur system kemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari 1) konservatif, 2) fundamentalis atau islamis, *Kedua*, kelompok modernis atau neomodernis, yakni berpendapat bahwa Islam mengataur masalah keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja, adapun secara teknis umat Islam bisa melakukan ijtihad, termasuk mengadopsi system lain, termasuk system Barat yang sudah menunjukkan kemaslahatannya. *Ketiga*, kelompok sekuler, yakni mereka yang ingin memisahkan antara Islam dan Negara, karena Islam, seperti agama-agama lainnya, tidak mengatur masalah keduniaan, sabagai mana praktik kenegaraan yang terdapat di Barat.

Hubungan antara agama dan Negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis hal ini disebabkan Hubungan agama dan Negara Islam adalah yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia. Juga Sepanjang sejarah hubungan antara kaum muslim dan non muslim Barat (Kristen Eropa) adalah hubungan yang penuh ketengangan dimulai dengan ekspansi militer politik Islam Klasik yang sebagian besar kerugian Kristen (hampir semua timur tengah adalah dahulunya kawasan Kristen malah pusatnya) dengan kulminasinya berupa pembebasan konstantinopel (ibu kota Eropa dan Dunia Kristen saat itu), kemudian perang salib yang kalah menang silih berganti namun kemudian di menangkan oleh Islam, lalu berkembang dalam tatanan dunia yang dikuasai oleh Barat imperialis-kolonialis dengan Dunia Islam sebagai yang paling dirugikan. Disebabkan oleh hubungan antara Dunia Islam dan Barat yang traumatic tersebut, lebih-lebih lagi karena dalam fasenya yang terakhir Dunia Islam dalam posisi "kalah" maka pembicaraan tentang Islam berkenaan dengan pandangan tentang Negara berlangsung dalam kepahitan menghadapi Barat.

Pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam yang melaksanakan kewajibankewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam dan tidak terlepas dari kepemimpinan Rasulullah Saw, sahabat-sahab Nabi sampai kepada dinasti-dinasti kerajaan Islam masa kejayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Mustofa. *Perluakah Negara Islam*. Surabaya; Padma Press.
- [2] Dian Rakyat. *Islam Doktrin Peradabab*. Jakarta; Pramadina
- [3] Hariansyah. 2008. *Psikologi Agama Benevolant Chemistry Untuk Menginsperasi Sikap Beraga*. Pontianak: STAIN Pontianak Press
- [4] Harun Nasution, 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press.
- [5] Hasan al-Banna, Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna, alih bahasa, Su'adi Sa'ad, 1986. "*Konsepsi Pembaruan Masyarakat Islam*", Jakarta: Media Da'wah.
- [6] Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002. *Islam & Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- [7] J. Suyuthi Pulungan, 2002. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [8] Jujun S. Suriasumantri, 2001. *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: mencari*

- Paradigma Kebersamaan,” dalam Dede Ridwan, ed. Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antara Disiplin Ilmu, Bandung: Nuansa.*
- [9] Karen Armstrong, 2004. *Muhammad Biografi Sang Nabi, Terj. Joko Sudaryanto, Yogyakarta: Penerbit Jendela.*
- [10] Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- [11] Lexy Moeloeng, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja, Rosdakarya*
- [12] Masykuri Abdillah, 2015. *Islam dan Demkrasai Respon Intelektual Muslim Terhadap Demokrasi 1966-1993. Jakarta: Prenadamedia Group.*
- [13] Mohammed S. Elwa, 1983. *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Terj. Anshori Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu.*
- [14] Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 2003. *Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani.*
- [15] Muhammad Husain Haekal, 2003. *Sejarah Hidup Muhammad, Terj. Ali Audah, cet, ke-29, Jakarta: Litera Antar Nusa.*
- [16] Muhammad Tahir Azhary, 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Prenada Media.*
- [17] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga*
- [18] Nurholish Madjid. 2007. *Islam Universal. Bandung; Pustaka Pelajar.*
- [19] Ridwa Lubis. 2017. *Agma dan Perdamaian Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.*
- [20] Sirajuddin, 2007. *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- [21] Suharsimi Arikunto, 1992. *Prosedur Penelitian, Suatu Pengantar Praktek. Jakarta: Bineka Cipta*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN